



Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

2023



**PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
DINAS KESEHATAN**

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas kesehatan Kabupaten Gowa untuk Tahun Anggaran 2023 dapat diselesaikan.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian Laporan Kinerja ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif dan berkelanjutan di masa mendatang.

Namun disadari bahwa dalam penyusunan Laporan Kinerja untuk Tahun Anggaran 2023 masih membutuhkan koreksian, untuk itu saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan sehingga penyusunan Laporan Kinerja di masa mendatang dapat lebih disempurnakan, terima kasih.

Sungguminasa, Februari 2024

Kepala Dinas Kesehatan



dr. Abdul Haris Usman

Nip. 19730223 200502 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Gambaran Umum Organisasi.....	2
C. Keadaan Pegawai.....	4
D. Isu Strategis	6
E. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	7
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....	8
A. Tujuan dan Sasaran.....	8
B. Strategi dan Arah Kebijakan.....	11
C. Indikator Kinerja Utama (IKU)	12
D. Perjanjian Kinerja	13
E. Standar Penilaian Kinerja.....	15
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	16
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	16
B. Realisasi Anggaran	38
BAB IV AKUNTABILITAS KINERJA	43
A. Kesimpulan Capaian Organisasi.....	43
B. Langkah Perbaikan Kinerja.....	43

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan.....	4
Tabel 2 Distribusi Pegawai Menurut Pangkat Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	6
Tabel 3 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026	10
Tabel 4 Indikator Kinerja Utama	12
Tabel 5 Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Kesehatan	14
Tabel 6 Rincian anggaran sasaran strategis	15
Tabel 7 Standar Penilaian Kinerja	15
Tabel 8 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	17
Tabel 9 Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023.....	18
Tabel 10 Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah Renstra.....	20
Tabel 11 Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya	21
Tabel 12 Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan Standar Nasional	24
Tabel 13 Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)	32
Tabel 14 Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023 .	34
Tabel 15 Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023	39

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa	3
Gambar 2 Pemeriksaan kehamilan pada Ibu hamil dengan alat USG	25
Gambar 3 Kegiatan pengkajian kasus kematian ibu dan bayi	27
Gambar 4 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil.....	27
Gambar 5 Pemberian PMT Lokal bagi balita gizi kurang.....	29
Gambar 6 Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah bagi remaja putri	29
Gambar 7 Pemberian F100 bagi gizi buruk rawat jalan sebagai tatalaksana gizi buruk	31
Gambar 8 Kegiatan kelas ibu balita.....	31

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak, sehingga diperlukan pengembangan dan penerapan sistem penyelenggaraan pembangunan dapat berjalan berhasil guna dan berdaya guna bersih dan bertanggung jawab. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review atas laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan perwujudan kewajiban Instansi Pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik serta penggunaan anggaran setiap akhir tahun anggaran. Memperhatikan Permenpan No. 53 Tahun 2014, maka Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2023.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa merupakan perwujudan kewajiban Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan dalam mencapai dan sasaran yang telah ditetapkan.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang telah dan seharusnya tercapai serta berbagai upaya yang telah dilakukan selama tahun anggaran dan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Bupati Gowa serta sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa untuk meningkatkan kinerjanya.

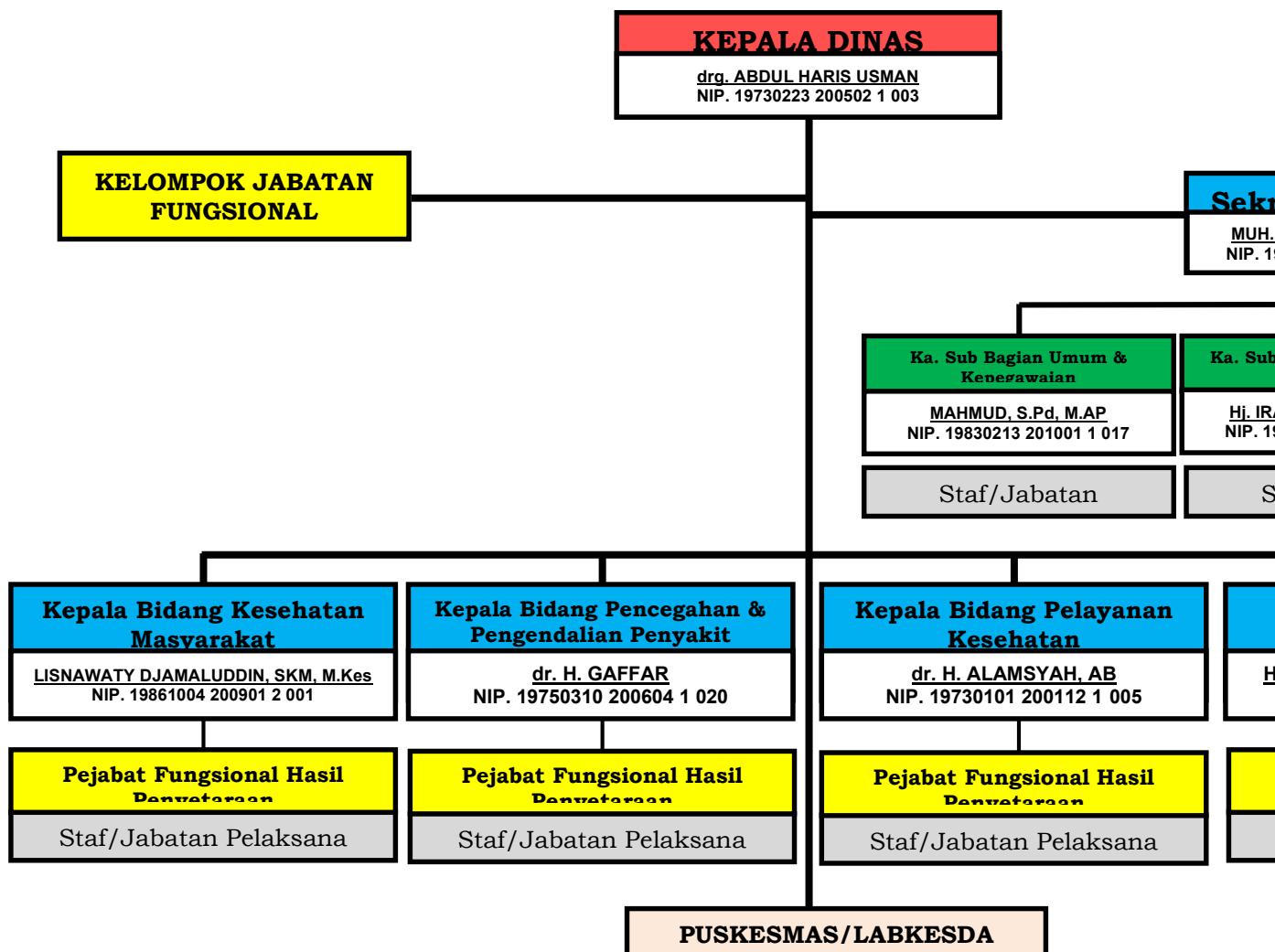
B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 83 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Disebutkan bahwa Dinas Kesehatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang kesehatan. Dinas Kesehatan dipimpin oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa yang dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Gowa.

Dinas Kesehatan dalam melaksanakan **tugas** pemerintahan di bidang kesehatan menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
2. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang kesehatan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Kesehatan;
4. Pelaksanaan administrasi Dinas; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KESEHATAN KAB (Peraturan Bupati Gowa Nomor 83 Tah



Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten

C. KEADAAN PEGAWAI

Jumlah pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa pada Tahun 2023 sebanyak 1057 orang tersebar di Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa dan UPT (Puskesmas dan UPTD Laboratorium). Distribusi pegawai menurut klasifikasi pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

NO	JENIS TENAGA	JUMLAH
(1)	(2)	(3)
A	MEDIS	
	DOKTER UMUM	72
	DOKTER GIGI	43
B	PARAMEDIS KESEHATAN	
	S1 KEPERAWATAN / Ns	165
	S2 PERAWAT	3
	AKPER	106
	SPK	5
	D3 PERAWAT GIGI	27
	D.IV PERAWAT GIGI	14
	SPRG	2
	AKBID	147
	D.IV KEBIDANAN	134
	S2 KEBIDANAN	1
	DI KEBIDANAN	7
C	PARAMEDIS NON PERAWATAN	
	APOTEKER	44
	S1 FARMASI	19
	S2 FARMASI	1
	AKFAR	28
	M.Kes (Nutrisionis)	1
	SKM NUTRISIONIS	23
	AKZI / AIGI	18
	SPAG	1

	SKM (Sanitarian)	30
	D.IV/ S1 Kesling	10
	APK / AKL	8
	D3 ANALISIS	28
	D.4 ANALISIS	7
	M.Kes (Laboratorium)	1
	D.3 Hiperkes	1
	M.Kes (Epidemiologi)	7
	SKM (Epidemiologi)	15
	M.Kes (Penyuluh Kesmas)	3
	SKM (Penyuluh Kes.Mas)	10
	D.III Rekam Medik	2
	S2 (M.Kes.)	8
	S2 M.Adm.Kes (Administrator)	2
	S1 M.Adm.Kes / SKM (Adminkes)	21
	SKM	20
	S2 M.Adm.Kes (Analisis SDM)	1
D	NON MEDIK	
	S2 (M.S.i)	4
	SARJANA LAIN (S1)	5
	S1 KOMPUTER	1
	PEKARYA KESEHATAN	4
	SLTA	6
	SLTP	2
	JUMLAH	1057

Tabel 2
Distribusi Pegawai Menurut Pangkat Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa
Tahun 2023

NO	PANGKAT	GOLONGAN	DINAS	PUSKESMAS/UPT	JUMLAH
1	Pembina Utama	IV/e		1	1
	Pembina Utama Madya	IV/d		1	1
	Pembina Utama Muda	IV/c	3	12	15
	Pembina Tk I	IV/b	6	87	93
	Pembina	IV/a	14	89	103
2	Penata Tk I	III/d	18	168	186
	Penata	III/c	4	137	141
	Penata Muda Tk I	III/b	11	216	227
	Penata Muda	III/a	2	86	88
3	Pengatur Tk I	II/d	1	32	33
	Pengatur	II/c	1	55	56
	Pengatur Muda Tk I	II/b	1	1	2
	Pengatur Muda	II/a		1	1
4	PPPK	X	1	24	25
		IX	1	27	28
		VII	1	56	57

D. ISU STRATEGIS

Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan Daerah karena dampaknya yang signifikan bagi Daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/ panjang, dan menentukan pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan Daerah di masa yang akan datang.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Kesehatan tidak terlepas dari berbagai kendala dan hambatan teknis yang merupakan isu-isu strategis yang perlu segera diatasi melalui berbagai pendekatan strategis agar mampu memecahkan setiap permasalahan. Isu-isu yang strategis yang dihadapi Dinas Kesehatan di antaranya adalah :

1. Masih adanya kematian Ibu dan Bayi

2. Masih adanya Kasus Gizi Buruk dan Kurang pada Balita
3. Masih adanya Balita Stunting
4. Masih adanya Penyakit Menular dan Tidak Menular

Berdasarkan analisa isu strategis, maka ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Kesehatan selama 5 tahun ke depan sebagaimana tercantum dalam Rencana Strategis Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 sebagai upaya ikut serta mewujudkan visi dan misi Kabupaten Gowa.

E. SISTEMATIKA LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta tahun 2023 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi Penjelasan umum Organisasi (Struktur Organisasi, Fungsi dan Tugas, Isu Strategis), Keadaan Pegawai dan Sistematika LKIP.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Bab ini berisi Perencanaan Strategis (Visi Misi Kepala Daerah, Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah, Strategi, Program dan Kegiatan) , Perjanjian Kinerja Tahun 2023, Rencana Anggaran Perubahan Tahun 2023 (Target Belanja Perangkat Daerah, Alokasi Anggaran Per Sasaran Strategis)

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tugas dan fungsi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta rencana tindak lanjut.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan hasil kerja (*outcome*) dari pelaksanaan program dan kegiatan dalam Renstra Dinas Kesehatan Rencana kinerja menggambarkan program dan kegiatan tahunan yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah dan indikator kinerja beserta target-targetnya berdasarkan program, kebijakan, dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra.

Renstra Dinas Kesehatan Tahun 2021-2026 memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan beserta indikator untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kegiatan sebagai perwujudan akuntabilitas pelaksanaan fungsi-fungsi pemerintahan.

A. TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan tujuan dan sasaran pada Rencana Strategis Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2021 – 2026 mengacu pada Misi kesatu, tujuan dan sasaran yang ada pada RPJMD Kabupaten Gowa tahun 2021–2026 yaitu:

- Misi ke-1 : Meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang unggul dan inklusif**
- Tujuan : Menciptakan kualitas sumberdaya manusia Yang unggul secara inklusif**
- sasaran : Meningkatkan derajat kesehatan Masyarakat**

Berdasarkan misi, tujuan dan sasaran RPJMD di atas, Dinas Kesehatan sebagai perangkat daerah yang bertanggung jawab di bidang urusan Kesehatan menetapkan tujuan dan sasaran organisasi dalam upaya mendukung capaian kinerja RPJMD Kabupaten Gowa 2021-2026. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan di antaranya adalah :

1. Tujuan

Guna mewujudkan Misi Bupati Gowa dalam Bidang Kesehatan Tahun 2021-2026, Dinas Kesehatan menetapkan Tujuan Strategis, yakni: **Peningkatan derajat kesehatan masyarakat** dengan indikator tujuan yaitu: Angka Harapan Hidup (AHH).

2. Sasaran

Keberhasilan pembangunan kesehatan sangat ditentukan oleh kesinambungan antar-upaya program dan sektor, serta kesinambungan dengan upaya-upaya yang telah dilaksanakan dalam periode sebelumnya. Dinas Kesehatan memiliki 2 (dua) sasaran dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kabupaten Gowa Tahun 2021-2026 sebagai berikut :

Sasaran 1 Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat, dengan indikator sasaran sebagai berikut:

- Jumlah Kematian Ibu
- Jumlah Kematian Bayi
- Prevalensi Stunting
- Prevalensi Wasting

Sasaran 2 Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

- Nilai Sakip

Tabel 3
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2021-2026

Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke -				
				2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Peningkatan derajat kesehatan masyarakat	Angka Harapan Hidup (AHH)	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	8	7	6	5	5
			Jumlah Kematian Bayi	19	18	17	16	16
			Prevalensi Stunting	18.4	16	14	12	12
			Prevalensi Wasting	7.5	7.3	7	6.7	6.7
		Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	Nilai Sakip	73	76	80.1	80.6	80.6

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk merealisasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat ditempuh dengan mengembangkan strategi pencapaian tujuan dan sasaran secara optimal. Adapun strategi Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. **Strategi 1** Meningkatkan akses, kualitas pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan fasilitas dan kualitas layanan kesehatan dasar dan rujukan termasuk sistem informasi dan tata kelola
 - b. Peningkatan penyelenggaraan jaminan kesehatan
 - c. Peningkatan pemenuhan ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan
 - d. Peningkatan kualitas dan kuantitas SDM
2. **Strategi 2** Meningkatkan status gizi balita, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan pelayanan gizi masyarakat melalui pendidikan gizi, suplementasi gizi, tata laksana gizi dan surveilans gizi.
3. **Strategi 3** Meningkatkan upaya pencegahan, pengendalian dan pemberantasan penyakit menular, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan cakupan dan mutu imunisasi
 - b. Pengendalian faktor risiko, penemuan dan tata laksana kasus penyakit menular
 - c. Penguatan surveilans epidemiologi dan penganggulangan KLB
4. **Strategi 4** Meningkatkan pencegahan dan pengendalian Penyakit Tidak Menular (PTM) melalui UKM dan UKP, dengan arah kebijakan :
 - a. Pengendalian faktor risiko PTM yang dapat diubah dan peningkatan pelayanan PTM
5. **Strategi 5** Pemenuhan akses pelayanan kesehatan ibu, anak, remaja, dan lanjut usia yang berkualitas, dengan arah kebijakan :
 - a. Peningkatan akses pelayanan kesehatan ibu dan anak, usia produktif dan usia lanjut yang berkualitas
6. **Strategi 6** Pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS), dengan arah kebijakan :
 - A. Promosi perubahan perilaku hidup sehat yang inovatif dan pembudayaan pembudayaan olahraga, pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat
7. **Strategi 7** Penguatan tata kelola program kesehatan yang baik dan bersih, dengan arah kebijakan:

- a. Penguatan manajemen kesehatan dalam pembangunan kesehatan
- b. Mendorong efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran pemerintah
- c. Meningkatkan pendekatan manajemen berbasis kinerja

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

IKU merupakan indikator kinerja suatu instansi, utamanya dalam mencapai tujuan dan sasaran tertentu. Perangkat daerah diwajibkan merumuskan indikator kinerja utama, dan menjadikan hal itu sebagai prioritas utama. Tujuan penetapan IKU bagi organisasi Dinas Kesehatan adalah:

1. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan atau pencapaian kinerja Dinas pada akhir tahun anggaran. Ukuran tersebut nantinya akan dijadikan patokan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja PNS dan organisasi.
2. Untuk mendapatkan informasi penting soal capaian kinerja PNS. Sehingga hal tersebut menjadi dasar pengembangan kompetensi dan pemenuhan sumber daya di organisasi.

Indikator Kinerja Utama Dinas Kesehatan ditetapkan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 400.7.28/139.a/Dinkes Tahun 2023 Adapun indikator kinerja utama Dinas Kesehatan yaitu :

Tabel 4
Indikator Kinerja Utama

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target Tahun				
			2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	8	7	6	5	5
		Jumlah Kematian Bayi	19	18	17	16	16
		Prevalensi Stunting	18.4	16	14	12	12
		Prevalensi Wasting	7.5	7.3	7	6.7	6.7
2	Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	Nilai Sakip	73	76	80.1	80.6	80.6

D. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan anggaran yang tersedia.

Perjanjian kinerja merupakan proses perjanjian rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategi yang akan dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam perjanjian kinerja memuat sasaran strategis dengan merinci 5 indikator kinerja dan target yang ditetapkan untuk dapat dicapai dalam tahun 2023.

Tabel 5
Perjanjian Kinerja 2023 Dinas Kesehatan

Tujuan 1 : Peningkatan derajat kesehatan masyarakat

Dengan sasaran, indikator dan target sebagai berikut :

Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Target	Program	Anggaran (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	13	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	105,980,651,567
	Jumlah Kematian Bayi	52	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	2,645,604,000
	Prevalensi Stunting	24	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	507,826,000
	Prevalensi Wasting	7.3	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	643,928,000
Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	Nilai Sakip	75	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	75,446,732,528

Sasaran strategis 1 yakni meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat didukung oleh Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan, Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman dan Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan total anggaran sebesar Rp. 109.778.009.567,- Sedangkan sasaran strategis 2 yakni meningkatnya tata kelola program kesehatan yang baik dan bersih didukung oleh Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total

anggaran sebesar Rp. 75.446.732.528,- Berikut rincian anggaran untuk masing-masing sasaran pada Dinas Kesehatan.

Tabel 6
Rincian anggaran sasaran strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran
(1)	(2)	(3)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	109,778,009,567
2	Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	75,446,732,528

Perjanjian Kinerja pada Dinas Kesehatan Pada Tahun 2023 mengalami 1 (satu) kali perubahan. Perjanjian Kinerja yang telah disusun dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kesehatan pada bulan januari 2023, kemudian dilakukan revisi pada bulan agustus 2023.

E. STANDAR PENILAIAN KINERJA

Agar dapat dilakukan analisis terhadap hasil kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa ditetapkan standar pencapaian sebagai parameter keberhasilan atau kegagalan dari pelaksanaan kebijakan teknis, program dan kegiatan sebagai berikut :

Tabel 7
Standar Penilaian Kinerja

Nilai %	Pencapaian
110 Keatas	Sangat tercapai/ Sangat berhasil
$90 \leq x < 110$	Tercapai/ Berhasil
$60 \leq x < 90$	Cukup tercapai/ Cukup berhasil
$x < 60$	Tidak tercapai/ Tidak berhasil

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian Kinerja organisasi menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.

Capaian Kinerja diatas mengacu pada sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Organisasi meliputi antara lain :

•**Sasaran 1, Meningkatkan Kualitas Kesehatan Masyarakat**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Jumlah kematian Ibu
2. Jumlah kematian bayi
3. Prevalensi stunting
4. Prevalensi wasting

•**Sasaran 2, Meningkatnya tata kelola program kesehatan yang baik dan bersih**, dengan indikator sasaran sebagai berikut :

1. Nilai sakiip

Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian Kinerja Tahun 2023 sebagai berikut adalah :

1. Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Adapun pencapaian kinerja Tahun Anggaran 2023 dari segi pengukuran kinerja yang dituangkan dalam Laporan Kinerja Tahunan ini merupakan hasil kinerja melalui Pengukuran Capaian Kinerja berdasarkan target dan realisasi yang dari sasaran yang telah diperjanjian kinerjanya adalah berdasarkan tabel dibawah ini :

Tabel 8
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)	KETERANGAN
				2023	2023	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	Orang	13	18	61.53	Realisasi tidak tercapai
		Jumlah Kematian Bayi	Orang	52	89	28.84	Realisasi tidak tercapai
		Prevalensi Stunting	Persentase	24	N/A	N/A	Realisasi / hasil survey belum dikeluarkan Kemenkes
		Prevalensi Wasting	Persentase	7.3	N/A	N/A	Realisasi / hasil survey belum dikeluarkan Kemenkes
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Sakip	Persentase	75	N/A	N/A	Realisasi belum ada karena belum ada penilaian dari Inspektorat

Dari tabel di atas, terdapat 2 (dua) sasaran strategis yang terbagi dalam 5 (lima) indikator. Adapun capaian kinerja target sasaran strategis dari setiap indikator mempunyai **rata-rata keberhasilan sebesar 45%** pada tahun 2023, adapun capaian tersebut baru menggambarkan 2 dari 5 indikator kinerja, dikarenakan beberapa realisasi kinerja belum ada.

2. Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 – 2023

Adapun Pengukuran Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 9
Realisasi dan Capaian Kinerja Tahun 2022 dan 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	DATA AWAL (2021)	REALISASI KINERJA					CAPAIAN KINERJA				
				2022	2023	2024	2025	2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	16	14	18				25	65.5			
		Jumlah Kematian Bayi	65	58	89				-100	28.8			
		Prevalensi Stunting	33	33	N/A				21	N/A			
		Prevalensi Wasting	4.8	8.8	N/A				83	N/A			
2	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih	Nilai Sakip	73	72.05	N/A				98%	N/A			

Pengukuran kinerja dari tahun 2022 – 2026 untuk menunjukkan peningkatan/penurunan kinerja dapat dilihat dari tabel di atas. Adapun perbandingan untuk setiap sasaran strategis dan indikator kerjanya adalah sebagai berikut :

a) Sasaran strategis : Meningkatnya kualitas Kesehatan Masyarakat

a. Indikator kinerja 1 : Jumlah kematian ibu

Target tahun 2023 sebesar 13 orang dan terealisasi sebesar 18 orang pencapaian kinerja 65.53%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kasus kematian ibu di tahun 2023 mengalami kenaikan.

b. Indikator kinerja 2 : Jumlah kematian bayi

Target tahun 2023 sebesar 52 orang dan terealisasi sebesar 89 orang pencapaian kinerja 28.84%. Jika dibandingkan dengan tahun 2022, kasus kematian bayi di tahun 2023 mengalami kenaikan.

c. Indikator kinerja 3 : Prevalensi stunting

Target tahun 2023 sebesar 24% dan realisasi belum ada karena Kementerian kesehatan belum mengeluarkan hasil survei stunting.

d. Indikator kinerja 4 : Prevalensi wasting

Target tahun 2023 7.3% dan realisasi belum ada karena Kementerian kesehatan belum mengeluarkan hasil survei wasting.

b) Sasaran strategis : Meningkatnya tata Kelola pemerintahan yang baik dan bersih

a. Indikator kinerja 1 : Nilai Sakip

Target tahun 2023 sebesar 75 dan realisasi belum ada karena belum dilakukan penilaian oleh Inspektorat

3. Perbandingan Realisasi Kinerja sampai tahun ini dengan target jangka menengah pada Rencana Strategis

Analisa berikutnya untuk melakukan pengukuran capaian kinerja adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Pengukuran Realisasi Kinerja dengan mengacu Tabulasi Target Jangka Menengah sebagaimana dalam Rencana Strategis Tahun 2021-2026, sebagaimana dalam tabel dibawah ini.

Tabel 10
Realisasi Kinerja yang mengacu pada Target Jangka Menengah
Renstra

No	Sasaran Startegis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi Kinerja				
			2026	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	5	14	18			
		Jumlah Kematian Bayi	16	58	89			
		Prevalensi Stunting	12	5.7	N/A			
		Prevalensi Wasting	6.7	4.32	N/A			
2	Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	Nilai Sakip	80.6	72.1	N/A			

4. Realisasi Kinerja dengan mengacu pada Standar Pelayanan Minimal (SPM)/ Standar Nasional lainnya

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator sasaran Dinas Kesehatan dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional sebagaimana tabel berikut:

Tabel 11
 Realisasi kinerja dan Standart Pelayanan Minimal/Standar Nasional lainnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Standar Nasional	
					Target	Capaian
			2023	2023	2023	2023
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Pelayanan kesehatan ibu hamil	12,945	13,117	100%	100%
		Pelayanan Kesehatan ibu bersalin	12,315	12,003	100%	97%
		Pelayanan Kesehatan bayi baru lahir	11,687	11,871	100%	100%
		Pelayanan kesehatan balita	51,509	48,976	100%	95%
		Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	79,961	81,841	100%	100%
		Pelayanan kesehatan pada usia produktif	343,080	337,514	100%	98%
		Pelayanan kesehatan pada usia lanjut	67,010	69,082	100%	100%

		Pelayanan kesehatan penderita hipertensi	89,384	86,844	100%	97%
		Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM)	8,333	8,106	100%	97%
		Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat	1,596	1,533	100%	96%
		Pelayanan kesehatan orang dengan tuberculosis (TB)	28,717	30,084	100%	100%
		Pelayanan kesehatan orang dengan resiko HIV	14,257	13,018	100%	91%

Berdasarkan capaian kinerja Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Kesehatan di Kabupaten Gowa tahun 2023 masih terdapat beberapa indikator yang belum mencapai target, antara lain :

a. Pelayanan kesehatan ibu bersalin

Capaian SPM kesehatan ibu bersalin tahun 2023 sebesar 97%, adapun permasalahan yang dihadapi karena kurang maksimalnya pemantauan sasaran ibu bersalin di wilayah kerja puskesmas serta masih kurangnya dukungan dari lintas program dan lintas sektor, serta masyarakat terkait pelaksanaan program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi (P4K).

b. Pelayanan kesehatan balita

Capaian SPM kesehatan balita tahun 2023 sebesar 95%, Adapun permasalahan yang dihadapi karena kurangnya partisipasi Masyarakat untuk melaksanakan pemantauan pertumbuhan pada balita di wilayah masih masih belum optimal.

- c. Pelayanan kesehatan pada usia produktif
Capaian SPM kesehatan pada usia produktif tahun 2023 sebesar 98%, Adapun permasalahan yang dihadapi karena tingginya sasaran sedangkan petugas yang menangani jumlahnya terbatas.
- d. Pelayanan kesehatan penderita hipertensi
Capaian SPM kesehatan penderita hipertensi tahun 2023 sebesar 97%, Adapun permasalahan yang dihadapi karena kurangnya partisipasi Masyarakat dalam memeriksakan diri ke fasilitas pelayanan kesehatan.
- e. Pelayanan kesehatan penderita diabetes mellitus (DM)
Capaian SPM kesehatan penderita diabetes mellitus tahun 2023 sebesar 97%, Adapun permasalahan yang dihadapi karena kurangnya kesadaran Masyarakat untuk melakukan skrining kesehatan dan masih ada penderita DM yang mengalami putus obat.
- f. Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat
Capaian SPM kesehatan orang dengan gangguan jiwa (ODGJ) berat tahun 2023 sebesar 96%, Adapun kendala yang dihadapi karena masih terdapat ODGJ yang belum terlayani sesuai standar karena adanya stigma di masyarakat yang malu dan menganggap ODGJ sebagai bukan penyakit yang bisa disembuhkan, masih ditemukan ODGJ yang tidak memiliki KIS sehingga putus obat dan terdapat beberapa jenis obat yang ditanggung BPJS tapi sulit ditemukan diapotik, sehingga mengganggu proses pengobatan pasien.
- g. Pelayanan kesehatan orang dengan risiko HIV
Capaian SPM kesehatan orang dengan risiko HIV tahun 2023 sebesar 91%, Adapun kendala yang dihadapi sehingga tidak dapat mencapai 100% karena SDM yang tidak merata dan petugas dilapangan masih banyak yang memegang banyak program sehingga kurang maksimal dalam melakukan kegiatan.

Tabel 12
Perbandingan Hasil Kinerja Sasaran Tahun 2023 dengan
Standar Nasional

Indikator Kinerja	Target Nasional	Realisasi	Keterangan
Angka Kematian Ibu	194	151	Tercapai
Angka Kematian Bayi	17.6	7.48	Tercapai

5. Analisis Penyebab Keberhasilan / kegagalan

Pengukuran Pencapaian Kinerja diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja selama tahun 2023 terdapat keberhasilan dan kegagalan yang harus dievaluasi untuk bahan pelaksanaan kegiatan di tahun berikutnya.

Adapun Keberhasilan/Kegagalan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan adalah sebagai berikut :

1. **Sasaran Strategis 1** : Meningkatkan kualitas kesehatan Masyarakat

a. Indikator 1 Jumlah kematian ibu :

Kematian ibu adalah banyaknya Wanita yang meninggal pada tahun tertentu dengan penyebab kematian yang terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya selama kehamilan, melahirkan dan masa nifas (42 hari setelah melahirkan). Angka kematian ibu berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi, kesehatan ibu, kondisi kesehatan lingkungan, dan tingkat pelayanan kesehatan terutama pada ibu hamil adalah pelayanan kesehatan waktu melahirkan dan masa nifas.

Kematian ibu dengan target tahun 2023 sebesar 16 orang dan terealisasi sebesar 18 orang, pencapaian kinerja sebesar 65.63%. Jika dibandingkan dengan beberapa tahun yang lalu, indikator sasaran jumlah kematian ibu mengalami peningkatan, hal ini memiliki arti jumlah kasus kematian ibu meningkat. Delapan belas (18) kasus kematian ibu di Kabupaten Gowa Tahun 2023 disebabkan faktor risiko perdarahan, eklampsia dan komplikasi obsetri.

Adapun permasalahan yang ditemui antara lain :

1. Kurangnya kesadaran ibu hamil untuk memeriksakan diri
2. Masih adanya pernikahan dini

3. Mobilitas penduduk yang tinggi sehingga ibu hamil tidak menetap dalam melakukan pemeriksaan kehamilan dan pelayanan persalinan
Dalam menurunkan kematian ibu di Kabupaten Gowa, Upaya yang telah dilakukan oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa antara lain :
 1. Upaya promotif dan preventif melalui sosialisasi P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi) di masing-masing wilayah Puskesmas, pemberdayaan Masyarakat (kader) untuk pendampingan ibu hamil, dan optimalisasi kelas ibu hamil.
 2. Peningkatan ANC yang berkualitas, untuk saat ini di semua Puskesmas Kab. Gowa sudah dilengkapi dengan alat USG untuk memeriksakan kehamilan ibu pada kunjungan pertama (K1) dan kunjungan ke 5 (K5) yang dilakukan oleh dokter pemeriksa di puskesmas, sehingga ketika ada masalah selama masa kehamilan bisa tertangani secara cepat.
 3. Pendampingan dokter ahli (obgyn) ke Puskesmas.
 4. Mengoptimalkan pelaksanaan AMPSR (Audit Maternal Perinatal Surveilans dan Respons) untuk bisa mengkaji kasus penyebab kematian ibu hamil. Sehingga tidak terjadi lagi kasus yang serupa dan bisa menurunkan Angka Kematian Ibu di Kabupaten Gowa.



Gambar 2 Pemeriksaan kehamilan pada Ibu hamil dengan alat USG

b. Indikator 2 : Jumlah kematian Bayi

Kematian bayi adalah kematian penduduk yang berusia dibawah satu tahun 1000 kelahiran hidup pada tahun tertentu di suatu tempat.

Penyebab kematian bayi dapat dibedakan dalam dua kelompok besar yaitu kematian endogen yang diakibatkan kesulitan pada saat kelahiran misalnya : cacat bawaan, luka – luka pada saat kelahiran/prematuritas, biasanya dalam 4 minggu pertama sesudah kelahiran (*neonatal mortality rate*). Kematian eksogen misalnya karena infeksi dan kecelakaan (*post neonatal*) satu bulan sampai satu tahun.

Pada tahun 2023 di Kabupaten Gowa terdapat kematian bayi sebanyak 89 kasus, dari total jumlah bayi lahir hidup sebanyak 11.894 bayi. Capaian tersebut bila dibandingkan dengan target adalah 28.84%, yang menandakan belum mencapai target.

Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Pemeriksaan ANC yang belum berkualitas,
2. Masih belum maksimalnya komunikasi informasi dan edukasi petugas dan belum terintegrasi dengan lintas program.
3. Layanan Program KIA di layanan posyandu belum maksimal, masih ada bidan koordinator dan bidan desa yang tidak dilibatkan dalam pelayanan posyandu.
4. Masih ada budaya kasus kawin lari dan menikah tidak sesuai undang – undang pernikahan dan ini masih banyak ditemukan disemua wilayah kerja puskesmas.

Upaya – upaya yang perlu dilakukan dalam menurunkan kematian bayi antara lain :

1. Supervisi Fasilitatif program KIA sampai ke bidan desa.
2. Pembinaan secara menyeluruh terkait penanganan kasus kegawatdaruratan Obstetri dan neonatal oleh dokter ahli obgyn dan spesialis anak
3. Pemeriksaan kehamilan melalui USG oleh dokter sehingga jika terjadi masalah pada janin bisa tertangani secara cepat
4. Kerja sama dengan LS terkait sosialisasi UU Pernikahan
5. Pelaksanaan AMPSR untuk pengkajian kasus kematian bayi, sehingga tidak terulang dengan kasus yang sama
6. Skrining penyakit jantung bawaan dengan menggunakan pulse oxymetri



Gambar 3 Kegiatan pengkajian kasus kematian ibu dan bayi



Gambar 4 Pelaksanaan Kelas Ibu Hamil

c. Indikator 3 : Prevalensi Stunting

Stunting (kerdil) pada anak mencerminkan kondisi gagal tumbuh pada anak bawah lima tahun akibat dari kekurangan gizi kronis, sehingga anak menjadi terlalu pendek untuk usianya. Faktor lingkungan berperan menyebabkan stunting pada anak, antara lain status gizi ibu, tidak cukup protein dalam proporsi asupan total asupan kalori, pola pemberian makan kepada anak, kebersihan lingkungan, dan angka kejadian infeksi di awal kehidupan anak. Selain faktor lingkungan, stunting juga disebabkan oleh faktor genetic dan hormonal, namun Sebagian besar disebabkan karena malnutrisi. Untuk indikator ini merupakan indikator upaya menekan angka kejadian, jadi semakin rendah kejadian prevalensi stunting maka penilaian kinerjanya semakin baik. Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat dan sesuai standar
2. Masih rendahnya cakupan ASI eksklusif
3. Partisipasi ibu balita untuk membawa anaknya secara rutin ke posyandu masih rendah sehingga pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak tidak optimal.

Upaya – upaya yang perlu dilakukan dalam menurunkan prevalensi stunting antara lain :

1. Pemberian PMT lokal bagi balita gizi kurang, berat badan tidak naik, dan berat bada kurang. Balita dengan masalah gizi ini jika tidak tertangani dengan baik maka akan berisiko tiga kali menjadi stunting.
2. Pemberian PMT lokal bagi ibu hamil KEK sehingga tidak melahirkan anak yang BBLR.
3. Sosialisasi Pemberian Makan Bayi dan Anak sesuai standar di kelas ibu balita dan posyandu.
4. Pelatihan konseling menyusui bagi petugas kesehatan agar bisa melakukan konseling kepada ibu menyusui yang mengalami kesulitan menyusui.
5. Rapat koordinasi lintas sektor terkait peningkatan partisipasi masyarakat khususnya ibu balita untuk datang ke posyandu membawa anaknya agar dipantau pertumbuhan dan perkembangannya.
6. Pemberian dan pemantauan konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) bagi Remaja Putri.
7. Pemeriksaan skrining anemia remaja putri untuk mengevaluasi pemberian TTD.
8. Ketersediaan alat antropometri kit di posyandu
9. Pelatihan pemantauan tumbuh kembang bagi kader



Gambar 5 Pemberian PMT Lokal bagi balita gizi kurang



Gambar 6 Pemberian Tablet Tambah Darah (TTD) di sekolah bagi remaja putri

d. Indikator 4 : Prevalensi Wasting

Kurus dan sangat kurus adalah keadaan gizi berdasarkan berat badan terhadap tinggi badan (BB/PB) atau berat badan terhadap tinggi badan (BB/TB), yang identik dengan wasted (kurus) dan sangat kurus (sangat kurus). 1 Wasting merupakan salah satu penyebab utama kematian pada anak balita karena kekurangan gizi

akut, penyakit infeksi, kekurangan gizi, asupan makanan yang tidak memadai menyebabkan keterlambatan pertumbuhan.

Adapun permasalahan yang dijumpai antara lain :

1. Pemberian makan bayi dan anak yang tidak tepat dan sesuai standar
2. Balita dengan wasting sering disertai dengan penyakit penyerta sehingga dengan intervensi terapi gizi saja tidak akan cukup
3. Masih rendahnya cakupan partisipasi ke posyandu sehingga deteksi dini masalah gangguan tumbuh kembang tidak berjalan optimal
4. Dari 26 puskesmas, hanya 4 puskesmas yang memiliki tim asuhan tatalaksana gizi buruk. Tim ini harus terlatih sesuai dengan standar kurikulum.. Yang menjadi kendala untuk melakukan pelatihan adalah keterbatasan anggaran APBD untuk melaksanakan pelatihan ini, sedangkan dalam dana DAK tidak tertuang menu Pelatihan Tatalaksana Gizi Buruk

Upaya yang dilakukan untuk menurunkan prevalensi wasting antara lain :

1. Pelaksanaan PMT Lokal bagi balita gizi kurang
2. Tatalaksana gizi buruk sesuai dengan standar operasional prosedur (SOP)
3. Memaksimalkan kegiatan MTBS di puskesmas sehingga balita sakit bisa tertangani dengan baik
4. Rapat lintas sektor untuk peningkatan cakupan D/S di posyandu
5. Sosialisasi standar operasional prosedur tatalaksana gizi buruk ke petugas kesehatan di puskesmas
6. Sosialisasi PMBA (pemberian makan bayi dan anak) yang sesuai standar di kelas ibu balita



Gambar 7 Pemberian F100 bagi gizi buruk rawat jalan sebagai tatalaksana gizi buruk



Gambar 8 Kegiatan kelas ibu balita

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Dinas Kesehatan sebagai Organisasi Perangkat Daerah dituntut untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan setiap tahunnya. Pemenuhan dan penggunaan sumber daya sangat berkaitan dengan sumber dana (anggaran). Analisis atas efisiensi penggunaan sumber dana dapat dilihat dari pelaksanaan kinerja dengan menyesuaikan kebutuhan kegiatan dan alokasi anggaran dengan prinsip dan efisien yaitu efisiensi apabila capaian kinerja lebih besar dibandingkan dengan capaian anggaran.

Dibandingkan dengan rata – rata capaian kinerja Sasaran “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat“ sebesar 45% maka penggunaan dana belum efektif dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 13
Analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran)

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			(%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu	Realisasi	Capaian (%)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	8	18	61.53	Rp 109,778,009,567	Rp 101,960,389,037	93	-48
	Jumlah Kematian Bayi	19	89	28.84				
	Prevalensi Stunting	18.4	N/A	N/A				
	Prevalensi Wasting	7,5	N/A	N/A				
Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	Nilai sakin	75	N/A	N/A	Rp 75,446,732,528	Rp 74,293,325,517	98	-

7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja (perjanjian kinerja)

Analisis merupakan suatu penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan sebenarnya. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja merupakan penjelasan capaian indikator kinerja dari program-program pendukung sehingga dapat dilakukan identifikasi mana program yang berhasil (capaian sesuai target) dan mana yang belum maksimal (capaian di bawah target). Berdasarkan hal tersebut, akan dilakukan tindak lanjut kepada program – program yang capaian tidak maksimal di tahun-tahun berikutnya.

Analisis terhadap pencapaian kinerja program Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa Tahun 2023 beserta dengan penyebab keberhasilan maupun kegagalan atau peningkatan atau penurunan kinerja dapat dilihat per indikator, pencapaian indikator kinerja program tersebut, dengan uraian sebagai berikut :

Tabel 14
Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Capaian (%)	Program	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian (%)	Rencana tindak lanjut
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Jumlah Kematian Ibu	61.53	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Rasio ketersediaan tempat tidur RS per satuan penduduk	0.7 : 1.000	0.7 : 1.000	100	Mempertahankan keberhasilan capaian kinerja sekaligus efisiensi anggaran
	Jumlah Kematian Bayi	28.84		Indeks Capaian SPM	100%	93%	93	Penguatan komitmen antara dinas, puskesmas dan jaringannya dalam penerapan SPM
	Prevalensi Stunting	N/A		Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna	50%	88%	176	Mempertahankan keberhasilan capaian kinerja sekaligus efisiensi anggaran
	Prevalensi Wasting	N/A	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk	Dokter 1 : 2.200, Dokter Spesialis 1 : 16.000, Dokter Gigi 1 : 7.500, Bidan 1 : 850, Perawat 1 : 560	Dokter 1 : 6.250, Dokter Spesialis 1 : 6.201, Dokter Gigi 1 : 10.526, Bidan 1 : 858, Perawat 1 : 670	Dokter : 84%, Dokter Spesialis : 161%, Dokter gigi : 60%, Bidan : 99%, Perawat : 80%	Diharapkan adanya penerimaan CPNS/PPK dalam memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di Kabupaten Gowa
				Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi	100%	100%	100	Mempertahankan keberhasilan capaian kinerja sekaligus efisiensi anggaran
				Persentase Sarana Kefarmasian yang Memenuhi Standar	85%	85%	103	Mempertahankan keberhasilan capaian kinerja sekaligus efisiensi anggaran
				Persentase pembinaan posyandu aktif	70%	99%	141	Mempertahankan keberhasilan capaian kinerja sekaligus efisiensi anggaran

Meningkatkan tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih	Nilai sakin		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Penunjang pelayanan Urusan Pembangunan Daerah	100%	100%	100	Mempertahankan keberhasilan capaian kinerja sekaligus efisiensi anggaran
---	-------------	--	---	--	------	------	-----	--

1) Penjelasan Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian Kinerja sebagaimana berikut :

Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat

Indikator 1 : Rasio ketersediaan tempat tidur RS per satuan penduduk,

Kapasitas tempat tidur pasien dalam rumah sakit atau fasilitas perawatan kesehatan adalah faktor penting dalam mengelola pasien dan layanan medis. Kapasitas tempat tidur yang tersedia dapat memengaruhi sejauh mana fasilitas tersebut dapat merawat pasien yang membutuhkan perawatan. Dilihat dari tabel diatas menunjukkan rasio ketersediaan tempat tidur RS per satuan penduduk di Kabupaten Gowa tercapai 100%.

Indikator 2 : Indeks Capaian SPM,

Standar Pelayanan Minimal bidang Kesehatan atau SPM Kesehatan merupakan ketentuan mengenai jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan wajib yang berhak diperoleh setiap warga negara secara minimal. SPM menjadi hal paling mendasar dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan. Indeks Capaian SPM bidang kesehatan dengan target 100% telah kurang berhasil tercapai dengan baik. Adapun kendala yang dijumpai dalam mencapai target yaitu target yang ditetapkan dalam SPM belum mengacu pada tahapan pendataan, belum adanya kesepahaman terkait target penerima layanan dan mutu layanan, masih kurangnya SDM dalam melaksanakan penerapan SPM.

Indikator 3 : Persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna

Akreditasi puskesmas adalah pengakuan terhadap puskesmas yang diberikan oleh Lembaga independent penyelenggara akreditasi yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan setelah dinilai bahwa Puskesmas telah memenuhi standar pelayanan puskesmas yang telah

ditetapkan oleh Menteri Kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan puskesmas secara berkesinambungan. Tujuan diberlakukannya akreditasi puskesmas adalah untuk membina puskesmas dan fasilitas pelayanan Kesehatan primer dalam upaya untuk berkelanjutan memperbaiki sistem pelayanan dan kinerja yang berfokus pada kebutuhan Masyarakat, keselamatan dan manajemen risiko. Target persentase puskesmas yang terakreditasi paripurna tahun 2023 adalah 50% dan terealisasi sebesar 88% dengan pencapaian kinerja sebesar 176%. Dari 26 puskesmas di Kabupaten Gowa, sebanyak 23 puskesmas yang terakreditasi paripurna. Adapun upaya yang telah dilakukan dalam mencapai kinerja adalah pembinaan secara pembinaan secara langsung ke puskesmas oleh tim pembina terpadu Dinas Kesehatan (TPCB), pembinaan secara tidak langsung melalui konsultasi via WA grup atau telepon, peningkatan kompetensi pimpinan dan petugas dalam hal tata kelola manajemen, tata kelola pelayanan dan penyelenggaraan program dan monitoring dan evaluasi oleh masing-masing bidang terkait penyelenggaraan program di puskesmas.

Indikator 4 : Rasio Tenaga Kesehatan per satuan penduduk

Tenaga kesehatan merupakan bagian dari sumber daya manusia kesehatan yang didalamnya terdiri atas Tenaga kesehatan medis, tenaga psikologi klinis, tenaga keperawatan, tenaga kebidanan, tenaga kefarmasian, tenaga kesehatan Masyarakat, tenaga gizi, tenaga kesehatan lingkungan, tenaga keteknisan medis, tenaga Teknik biomedika, tenaga kesehatan tradisional, dan tenaga kesehatan lainnya. Pada saat ini kondisi tenaga kesehatan di Kabupaten Gowa masih mengalami ketidakmerataan dalam pendaayagunaannya. Berdasarkan ratio dari jumlah tenaga kesehatan yang ada masih belum mampu memenuhi kebutuhan penduduk di Kabupaten Gowa. Masih kurangnya jumlah sumber daya manusia kesehatan ini akan mempengaruhi terhadap kualitas dan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan.

Indikator 5 : Proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi

SDM Kesehatan yang mengikuti proses sertifikasi kompetensi melalui uji kompetensi sesuai dengan standar kompetensi kerja (SKKN,SKKK,SKKI) atau standar kompetensi jabatan fungsional kesehatan atau sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan dan

dilakukan oleh lembaga sertifikasi atau instansi pemerintah penyelenggara uji sesuai ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Setiap tenaga kesehatan yang menjalankan praktik wajib memiliki STR. Dilihat dari tabel diatas menunjukkan proporsi tenaga kesehatan tersertifikasi tercapai 100% artinya seluruh tenaga kesehatan di Kabupaten Gowa telah tersertifikasi.

Indikator 6 : Persentase Sarana Kefarmasian yang memenuhi standar,

Fasilitas Pelayanan Kefarmasian adalah sarana yang digunakan untuk menyelenggarakan pelayanan kefarmasian, yaitu apotek, instalasi farmasi rumah sakit, puskesmas, klinik, toko obat, atau praktek bersama. Target persentase sarana kefarmasian yang memenuhi standar tahun 2023 sebesar 85% dan terealisasi sebesar 85.7% dengan pencapaian kinerja sebesar 100%. Dari 112 sarana kefarmasian yang ada terdapat 96 sarana yang telah memenuhi standar. Adapun permasalahan yang ditemukan dilapangan terkait sarana kefarmasian yang belum memenuhi standar yaitu masih terdapat apotek dan toko obat yang tidak memperhatikan suhu ruangan tempat penyimpanan obat sehingga banyak ditemukan obat yang rusak. Sehingga Dinas Kesehatan dalam melakukan kunjungan sarana kefarmasian selalu menghimbau kepada apotek dan toko obat untuk menerapkan standar usaha apotek dan toko obat utamanya permasalahan suhu ruangan penyimpanan obat.

Indikator 7 : Persentase Pembinaan Posyandu Aktif

Posyandu merupakan salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat, yang dikelola dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat, dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi. Target persentase pembinaan posyandu aktif tahun 2023 sebesar 70% dan terealisasi sebesar 99% dengan pencapaian kinerja sebesar 141%. Dari 795 jumlah posyandu yang ada di Kabupaten Gowa terdapat 785 posyandu yang dibina dan aktif pada tahun 2023. Adapun upaya yang dilakukan sehingga indikator kinerja pembinaan

posyandu aktif dapat tercapai yaitu petugas promosi kesehatan berkolaborasi dengan program lain di puskesmas untuk melakukan edukasi dan pembinaan seperti, bimbingan teknis dan supervise UKBM pada kader posyandu terkait cakupan yang masih rendah.

2) **Upaya perbaikan pada perencanaan berikutnya**

Berdasarkan hasil evaluasi program kegiatan yang dilaksanakan Dinas Kesehatan pada tahun 2023 melalui 5 (lima) analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut diatas, ada beberapa upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk perencanaan tahun berikutnya, yaitu:

Sasaran 1: Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat,

Upaya perbaikan dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat di tahun berikutnya adalah meningkatkan fungsi puskesmas dan jaringannya dalam penyelenggaraan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat, penyediaan sarana prasarana kesehatan yang lebih memadai, peningkatan kualitas sanitasi layak dan perbaikan gizi. Serta peningkatan kapasitas bagi sumber daya manusia kesehatan dalam pemberian pelayanan kesehatan yang bermutu.

Sasaran 2 : Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih,

Upaya perbaikan dalam meningkatkan tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih di tahun berikutnya adalah meningkatkan mutu pengelolaan kesehatan, serta penyusunan perencanaan perangkat daerah yang komprehensif, terintegrasi dan berbasis bukti.

B. REALISASI ANGGARAN

Penyerapan anggaran belanja langsung pada tahun 2023 sebesar 95% dari total anggaran yang dialokasikan. Adapun anggaran dan realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan Perjanjian Kinerja Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 15
Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Jumlah (Rp)	
		Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)
	Sasaran : Meningkatkan tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih		
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Rp 75,446,732,528	Rp 74,298,185,517
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp 171,448,746	Rp 170,798,728
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rp 171,448,746	Rp 170,798,728
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp 73,779,733,459	Rp 72,747,972,755
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Rp 73,644,745,459	Rp 72,612,985,755
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Rp 134,988,000	Rp 134,987,000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp 799,620,412	Rp 714,364,040
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Rp 11,629,500	Rp 11,555,000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Rp 176,628,100	Rp 170,584,600
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Rp 61,002,812	Rp 60,878,223
	Fasilitas Kunjungan Tamu	Rp 5,850,000	Rp 5,800,000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rp 544,510,000	Rp 465,546,217
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp 642,709,911	Rp 617,426,494
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Rp 220,636,711	Rp 211,650,494
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Rp 422,073,200	Rp 405,776,000

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	53,220,000	Rp	47,623,500
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Rp	29,440,000	Rp	28,847,600
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rp	15,400,000	Rp	11,067,000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Rp	8,380,000	Rp	7,708,900
	Sasaran : Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat				
II	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Rp	105,980,651,567	Rp	98,497,151,097
	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Rp	27,277,175,200	Rp	26,140,868,492
	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Rp	1,666,101,800	Rp	748,945,770
	Pengadaan Obat, Vaksin	Rp	5,800,000,000	Rp	5,800,000,000
	Pengadaan Bahan Habis Pakai	Rp	2,837,600,000	Rp	2,652,319,598
	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Rp	16,973,473,400	Rp	16,939,603,124
	Penyediaan Layanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	78,071,097,367	Rp	72,014,862,105
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Rp	244,392,500	Rp	47,592,200
	Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan	Rp	207,236,000	Rp	186,921,075
	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Rp	57,920,000	Rp	24,160,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga	Rp	31,382,200	Rp	24,925,973
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Rp	185,909,666	Rp	184,470,000

	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Rp 52,360,000	Rp 50,470,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Rp 730,330,000	Rp 715,575,696
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Resiko Terinfeksi HIV	Rp 240,000,000	Rp 236,250,000
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Rp 254,530,500	Rp 122,905,500
	Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat	Rp 75,081,591,958	Rp 69,647,372,806
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK)	Rp 161,650,000	Rp 98,715,800
	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Malaria	Rp 137,000,000	Rp 119,646,955
	Pelayanan Kesehatan penyakit menular dan Tidak Menular	Rp 686,794,543	Rp 555,856,100
	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Rp 173,225,000	Rp 117,710,000
	Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 459,154,000	Rp 223,710,500
III	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Rp 2,645,604,000	Rp 2,379,737,140
	Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 125,000,000	Rp 123,685,750
	Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp 125,000,000	Rp 123,685,750
	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Rp 25,000,000	Rp 23,800,000
	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Rp 25,000,000	Rp 23,800,000
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,495,604,000	Rp 2,232,251,390
	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp 2,495,604,000	Rp 2,232,251,390

IV	PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Rp	507,826,000	Rp	498,612,300
	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	226,453,000	Rp	223,945,000
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Rp	226,453,000	Rp	223,945,000
	Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	171,577,000	Rp	168,066,300
	Pengendalian dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Rp	171,577,000	Rp	168,066,300
	Pemeriksaan Dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga	Rp	109,796,000	Rp	106,601,000
	Pemeriksaan Post Market Pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Yang Beredar dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan	Rp	109,796,000	Rp	106,601,000
V	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Rp	643,928,000	Rp	575,888,500
	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	643,928,000	Rp	575,888,500
	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Rp	643,928,000	Rp	575,888,500

BAB IV

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan kinerja disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah pada tahun 2023 sebagai bahan pengambilan keputusan dalam perencanaan tahun berikutnya.

A. KESIMPULAN CAPAIAN ORGANISASI

1. Dari analisis sasaran Dinas Kesehatan “Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat”, terdapat 4 (empat) indikator kinerja utama yang dipilih sebagai tolak ukur. Pada tahun 2023, dari 4 (empat) indikator sasaran masih terdapat 2 (dua) indikator yang belum dapat mencapai target, sedangkan 2 (dua) target lainnya capain kinerja belum ada karena menunggu hasil survey dari kementerian kesehatan. Sasaran “Meningkatnya tata kelola Program Kesehatan yang baik dan bersih” terdapat 1 (satu) indikator yaitu nilai sakip, capaian kinerja belum ada karena belum ada penilaian dari Inspektorat .
2. Dari analisis indikator program, terdapat 6 (enam) dari 8 (delapan) indikator kinerja program dicapai sesuai target.
3. Realisasi kinerja anggaran (keuangan) Dinas Kesehatan pada tahun 2023 yaitu sebesar 95%.

B. LANGKAH PERBAIKAN KINERJA

Langkah – Langkah / strategi yang akan diambil Dinas Kesehatan dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan fungsi Puskesmas dalam pelayanan Kesehatan dasar, pemberdayaan Masyarakat dalam bidang Kesehatan dan melibatkan lintas sektor.
2. Peningkatan peran Rumah sakit dalam menurunkan kematian maternal dan perinatal.
3. Peningkatan Upaya promotif dan preventif serta edukasi kepada masyarakat terkait faktor risiko penyakit tidak menular, peningkatan skrining dan deteksi dini penyakit tidak menular di FKTP dan jejaringnya.

4. Pemenuhan dan peningkatan kualitas SDM Kesehatan.
5. Memaksimalkan sinergitas lintas program, lintas sektor serta peran serta Masyarakat dan sektor swasta dalam pelaksanaan dalam berbagai program kesehatan.